

Dinamika Politik dan Sosial pada Masa Dinasti Umayyah (661-750 M): Analisis Historis dan Konseptual dalam Perspektif Peradaban Islam Klasik

Anis Mahmud Sitompul¹, Reza Andhika², Siti Thazwa³

¹²³Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Mahmudsitompulanis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik dan sosial pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), periode yang menandai transformasi besar dalam sistem pemerintahan Islam pasca-Khulafā' Rāshidīn. Dengan menggunakan pendekatan historis-kualitatif dan telaah pustaka, studi ini menguraikan perubahan struktur politik, proses konsolidasi kekuasaan, serta dampaknya terhadap tatanan sosial masyarakat Muslim awal. Dinasti Umayyah memperkenalkan sistem monarki turun-temurun dan birokrasi administratif yang kompleks, yang kemudian memengaruhi hubungan antara elite politik, ulama, dan rakyat. Secara sosial, muncul stratifikasi antara Arab dan non-Arab (mawālī), urbanisasi pesat, serta interaksi budaya lintas wilayah. Penelitian ini menemukan bahwa dinamika politik-sosial pada era Umayyah bersifat dialektis: kekuasaan politik membentuk tatanan sosial baru, sementara tekanan sosial turut mendorong reformasi dan perubahan dalam kebijakan politik. Hasil studi ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman terhadap proses pembentukan peradaban Islam klasik dan pola hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan agama.

Kata kunci: *Dinasti Umayyah, politik Islam klasik, dinamika sosial, peradaban Islam.*

Abstract

This study aims to analyze the political and social dynamics during the Umayyad Dynasty (661-750 CE), a period that marked a major transformation in the Islamic governance system following the era of the Khulafā' al-Rāshidīn. Using a historical-qualitative approach and library research, this study outlines the changes in political structures, the process of power consolidation, and their impact on the social order of early Muslim society. The Umayyad Dynasty introduced a hereditary monarchy and a complex administrative bureaucracy, which subsequently influenced the relationships between political elites, religious scholars (ulama), and the general populace. Socially, this period witnessed the emergence of stratification between Arabs and non-Arabs (mawālī), rapid urbanization, and cross-cultural interactions across regions. The study finds that the political and social dynamics of the Umayyad era were dialectical in nature: political power shaped a new social order, while social pressures also prompted reforms and changes in political policies. The findings of this research contribute

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

significantly to the understanding of the formation of classical Islamic civilization and the patterns of interaction between authority, society, and religion.

Keywords: Umayyad Dynasty, classical Islamic politics, social dynamics, Islamic civilization.

1. Pendahuluan

Perubahan struktur politik pada masa Dinasti Umayyah menandai pergeseran signifikan dalam sejarah Islam. Jika pada masa Khulafā' Rāshidīn kekuasaan dijalankan secara kolektif dan berbasis legitimasi moral serta religius, maka di bawah pemerintahan Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān sistem tersebut berubah menjadi monarki hereditas.¹ Hal ini menimbulkan transformasi dalam konsep kepemimpinan Islam, di mana kekuasaan tidak lagi hanya didasarkan pada keutamaan agama dan musyawarah umat, tetapi juga pada garis keturunan dan kekuatan politik. Sistem monarki ini membawa stabilitas administratif dan kontinuitas pemerintahan, namun sekaligus menimbulkan jarak antara penguasa dan rakyat.² Legitimasi politik tidak lagi bersumber utama dari nilai-nilai keagamaan, melainkan dari kemampuan dinasti mempertahankan kekuasaan dan mengelola wilayah yang luas secara efektif.

Perubahan politik tersebut berdampak langsung pada tatanan sosial masyarakat Islam. Munculnya birokrasi pemerintahan yang terpusat dan terorganisir menyebabkan lahirnya kelas baru dalam masyarakat, seperti para pejabat administrasi (kuttāb), tentara profesional, dan gubernur-gubernur daerah yang memiliki otonomi luas. Di sisi lain, masyarakat non-Arab terutama bangsa Persia, Romawi Timur, dan Berber mulai memainkan peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi. Meski awalnya terdapat diskriminasi terhadap non-Arab (mawālī), interaksi antara kelompok ini dengan masyarakat Arab secara bertahap mendorong proses asimilasi budaya dan pembentukan identitas Islam yang lebih universal. Perubahan sosial ini menjadi fondasi penting bagi berkembangnya masyarakat kosmopolitan dalam dunia Islam. Ekspansi wilayah yang dilakukan Dinasti Umayyah turut memperluas cakrawala sosial dan ekonomi. Penaklukan hingga ke Spanyol (Andalus) di barat dan ke wilayah Asia Tengah di timur membawa konsekuensi besar dalam hal perdagangan, pertanian, dan mobilitas penduduk. Kota-kota seperti Damaskus, Kufah, Basrah, dan Cordoba berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan intelektual. Urbanisasi yang pesat memunculkan dinamika baru, termasuk lahirnya kelas menengah perkotaan yang berperan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Dalam konteks ini, peradaban Islam masa Umayyah mulai memperlihatkan ciri global, di mana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan tradisi lokal yang beragam, menciptakan bentuk-bentuk baru dalam kehidupan sosial dan budaya.

Namun, ketimpangan sosial dan politik juga menjadi konsekuensi dari sistem pemerintahan baru ini. Kebijakan yang cenderung mengutamakan elite Arab menyebabkan munculnya rasa ketidakpuasan di kalangan mawālī dan masyarakat non-Arab. Ketidakadilan dalam distribusi ekonomi dan kekuasaan menimbulkan gejolak sosial yang meluas, seperti pemberontakan di wilayah Khurasan dan Irak. Di sisi lain, kelompok keagamaan seperti Syiah memanfaatkan situasi ini untuk menentang legitimasi politik Umayyah. Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik yang dibangun melalui kekuasaan terpusat tidak selalu sejalan dengan keharmonisan sosial. Ketegangan antara pusat dan daerah, antara Arab dan non-Arab, serta antara kekuasaan politik dan aspirasi religius menjadi faktor yang terus memengaruhi dinamika internal dinasti ini. Pada akhirnya, Dinasti Umayyah dapat dipahami sebagai fase penting yang memadukan kekuasaan politik dengan proses sosial yang kompleks.

¹ Ikhsan Darmawan, Siska Afriany & Syarifah, *The Early Umayyad Period: Formation, Political Development, Social Conditions, Religious Affairs, and Civilizational Progress*, Jurnal Pendidikan Islam 1(2) (Mei 2024) hlm. 53–64.

² Muhammad Ridho Nur, 'Reforming the Islamic Economic and Administration System during the Umayyad Dynasty', *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 11(1) (2021).

Meski sering dikritik karena kecenderungan otoriter dan bias etnis, pemerintahan Umayyah berhasil meletakkan dasar bagi pembentukan peradaban Islam yang luas dan beragam. Integrasi berbagai budaya, sistem administrasi yang efisien, dan perluasan wilayah menjadi warisan penting bagi dinasti-dinasti berikutnya, terutama Abbasiyah. Dengan demikian, memahami Dinasti Umayyah tidak cukup hanya dari perspektif politik, tetapi juga perlu dilihat sebagai laboratorium sosial di mana interaksi antara kekuasaan, masyarakat, dan budaya membentuk wajah awal peradaban Islam klasik yang berpengaruh hingga berabad-abad kemudian.

Kajian ilmiah mengenai Dinasti Umayyah telah banyak dilakukan, baik oleh sejarawan Muslim klasik maupun akademisi modern. Secara umum, literatur dapat dikelompokkan dalam tiga perspektif utama:

1. Perspektif politik-institusional.

Karya-karya klasik seperti *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* karya Al-Māwardī dan *Ara' Ahl al Madīnah al-Fāḍilah* karya Al-Fārābī memberikan kerangka teoretis tentang legitimasi dan struktur pemerintahan Islam.³ Dalam konteks modern, studi seperti *The Formation of Islamic State* oleh Crone & Hinds (1986) mengupas perubahan bentuk kekuasaan dari khilāfah menjadi monarki dinasti.

2. Perspektif sosial-historis.

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menekankan konsep *‘aṣabiyyah* (solidaritas kelompok) sebagai motor pembentuk dan penghancur dinasti.⁴ Pemikir modern seperti Muhammad Umer Chapra (1999) menafsirkan teori tersebut sebagai dinamika sosial-ekonomi yang mendasari naik-turunnya peradaban Islam.

3. Perspektif interaksi politik-sosial.

Penelitian kontemporer, misalnya Sodikin & Radiamoda (2023), menunjukkan bahwa pembentukan konstitusi dan institusi politik Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Fatmawati (2023) juga menyoroti tradisi intelektual dan sosial masyarakat Umayyah yang berkembang bersamaan dengan birokratisasi politik.

Dari ketiga perspektif tersebut, terlihat adanya celah penelitian: masih minim kajian yang menganalisis keterkaitan langsung antara dinamika politik dan sosial pada periode Umayyah secara integratif. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi ruang tersebut dengan pendekatan historis-sosiologis yang memadukan analisis struktural dan kultural

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) yang bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik Islam seperti *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* karya Al-Māwardī, *Muqaddimah* oleh Ibn Khaldun, serta kronik sejarah seperti *Tārīkh al-Ṭabarī* dan karya al-Balādhurī. Sementara itu, sumber sekunder mencakup penelitian-penelitian akademik modern dalam bentuk artikel jurnal, disertasi, dan buku sejarah, termasuk di antaranya karya Chapra (1999) yang membahas dinamika sosial-politik dalam pemikiran Ibn Khaldun, Fatmawati (2023) mengenai tradisi intelektual dan dinamika sosial pada masa Dinasti Umayyah, serta Sodikin dan Radiamoda (2023) yang mengkaji dinamika konstitusi Islam. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: pertama, reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan terhadap aspek politik dan sosial; kedua, kategorisasi tematik, yakni pengelompokan data ke dalam tema-tema besar seperti politik pemerintahan, dinamika sosial, dan interaksi keduanya; ketiga, interpretasi historis-konseptual untuk mengaitkan fakta-fakta sejarah dengan teori sosial Islam klasik, terutama konsep *‘aṣabiyyah* dan legitimasi kekuasaan.

³ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 45–52.

⁴ Ibn Khaldūn, *Al-Muqaddimah* (Kairo: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 157–170.

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan narasi sejarah klasik dengan interpretasi akademik modern secara kritis.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Struktur Politik Dinasti Umayyah: Transformasi dan Konsolidasi Kekuasaan

Transformasi struktur politik pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu perubahan paling mendasar dalam sejarah pemerintahan Islam. Setelah berakhirnya masa Khulafā' Rāshidīn, sistem pemerintahan Islam beralih dari model kolegial yang berbasis musyawarah dan legitimasi religius menuju sistem monarki turun-temurun.⁵ Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān, pendiri Dinasti Umayyah, tidak hanya mengonsolidasikan kekuasaan secara politik tetapi juga memperkenalkan konsep baru tentang kepemimpinan yang menekankan stabilitas dan efektivitas pemerintahan di atas idealisme spiritual. Peralihan ini menandai lahirnya negara Islam dalam bentuk yang lebih terorganisir dan berorientasi pada administrasi pemerintahan, bukan sekadar komunitas religius seperti pada masa awal Islam.

Salah satu langkah penting Mu'āwiyah adalah pembentukan struktur birokrasi yang terpusat di Damaskus. Ia mengadopsi sistem administrasi dari model Persia dan Bizantium, dua peradaban besar yang sebelumnya telah memiliki sistem pemerintahan yang maju. Dengan memperkenalkan jabatan seperti wazīr (menteri), kātib (sekretaris), dan amīl (pemungut pajak), Mu'āwiyah berhasil menciptakan jaringan pemerintahan yang efisien untuk mengelola wilayah Islam yang terus meluas. Sistem diwān yang dikelola secara sistematis memungkinkan pencatatan gaji tentara, pengelolaan pajak, dan distribusi keuangan negara secara lebih teratur. Adaptasi sistem ini menunjukkan kemampuan politik Umayyah dalam mengintegrasikan unsur-unsur administrasi asing ke dalam struktur Islam tanpa kehilangan identitasnya.

Namun, sentralisasi kekuasaan yang dilakukan Mu'āwiyah juga menimbulkan implikasi politik yang kompleks. Pemindahan pusat pemerintahan ke Damaskus, jauh dari pusat-pusat religius seperti Madinah dan Makkah, menciptakan jarak simbolik dan emosional antara penguasa dan masyarakat Hijaz yang selama ini menjadi basis spiritual Islam. Wilayah Irak dan Khurasan, yang kaya dan berpengaruh, juga merasa termarginalkan dari proses pengambilan keputusan. Ketegangan ini berulang kali memunculkan perlawanan politik, seperti pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dari kalangan Alawiyah dan Khawarij. Dengan demikian, meskipun sistem monarki Umayyah memberikan stabilitas, ia juga membuka ruang bagi munculnya konflik baru antara idealisme religius dan realitas politik.⁶

Kebijakan para penerus Mu'āwiyah memperkuat arah monarki ini. Yazīd I, misalnya, mewarisi kekuasaan secara turun-temurun, yang memicu kontroversi besar dalam sejarah Islam terutama peristiwa tragis Karbala yang memperdalam perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah. Setelah itu, 'Abd al-Malik ibn Marwān muncul sebagai tokoh kunci dalam konsolidasi kekuasaan Umayyah. Ia melakukan reformasi politik, ekonomi, dan administratif yang memperkuat struktur negara. Penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan tidak hanya memudahkan koordinasi birokrasi, tetapi juga memperkuat identitas politik dan budaya Islam. Pencetakan mata uang Islam pertama menandakan kemandirian ekonomi dari kekuasaan Bizantium dan Persia, serta mempertegas simbol kedaulatan politik Islam di dunia internasional.

Selain itu, reformasi 'Abd al-Malik juga membentuk konsep baru tentang kekuasaan khalifah. Jika pada masa sebelumnya khalifah berfungsi sebagai pemimpin religius yang melanjutkan misi kenabian, maka pada masa Umayyah posisi tersebut bergeser menjadi penguasa politik yang memiliki otoritas absolut. Konsep imāmah (kepemimpinan spiritual) digantikan oleh konsep mulk (kerajaan atau kekuasaan duniawi), di mana khalifah lebih

⁵ Muawiyah I", *Encyclopaedia Britannica*, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.britannica.com/biography/Muawiyah-I>.

⁶ Fred M. Donner, *The Early Islamic Conquests* (Princeton: Princeton University Press, 1981), 178–180.

berperan sebagai raja yang melindungi stabilitas politik dan keamanan negara. Pergeseran ini menimbulkan kritik tajam dari sebagian ulama dan tokoh keagamaan, yang menilai bahwa pemerintahan Umayyah terlalu menekankan kekuasaan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai keadilan serta kesederhanaan Islam awal.

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang dibangun oleh Dinasti Umayyah meletakkan dasar penting bagi terbentuknya pemerintahan Islam yang modern dalam konteks abad pertengahan. Konsolidasi kekuasaan, pembentukan birokrasi terpusat, dan reformasi administratif menciptakan struktur pemerintahan yang mampu mengelola wilayah dari Spanyol hingga India. Dalam jangka panjang, sistem ini menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam setelahnya, termasuk Abbasiyah dan bahkan kerajaan-kerajaan Islam di kemudian hari. Dengan demikian, struktur politik Dinasti Umayyah tidak hanya mencerminkan perubahan dalam konsep kekuasaan, tetapi juga menjadi tonggak awal munculnya negara Islam dengan sistem pemerintahan yang rasional, terorganisir, dan memiliki legitimasi politik yang kompleks.

2. Dinamika Sosial di Masa Umayyah: Stratifikasi dan Mobilitas

Perubahan politik yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah tidak hanya membentuk sistem pemerintahan yang baru, tetapi juga membawa dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Islam. Dengan munculnya sistem monarki dan birokrasi terpusat, masyarakat Islam klasik mulai terstratifikasi ke dalam beberapa lapisan sosial yang mencerminkan posisi mereka dalam struktur politik dan ekonomi. Kelompok Arab Muslim (al-‘Arab al-Muslimūn) menempati posisi tertinggi sebagai elit politik dan militer yang mengendalikan pemerintahan. Mereka adalah keturunan suku-suku Arab yang berperan besar dalam penaklukan wilayah Islam, sehingga dianggap memiliki hak istimewa atas jabatan dan gaji negara. Di bawah mereka terdapat mawālī, yaitu kaum non-Arab yang masuk Islam, serta ahl al-dhimmah atau non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Stratifikasi ini menciptakan tatanan sosial yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketegangan horizontal di antara kelompok-kelompok tersebut.⁷

Mawālī menempati posisi penting dalam dinamika sosial Dinasti Umayyah. Meskipun mereka telah memeluk Islam, pada masa awal mereka tidak memperoleh status sosial dan politik yang setara dengan kaum Arab. Kebijakan diskriminatif terhadap mawālī terlihat dalam pembatasan jabatan publik dan ketimpangan dalam sistem ekonomi. Mereka tetap diwajibkan membayar pajak jizyah, yang seharusnya hanya dikenakan kepada non-Muslim. Perlakuan semacam ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam di kalangan non-Arab Muslim, terutama di wilayah Persia dan Irak, di mana populasi mawālī sangat besar. Ketegangan sosial ini kemudian melahirkan berbagai gerakan keagamaan dan politik, seperti Khawarij dan Syi’ah, yang tidak hanya menentang legitimasi politik Umayyah tetapi juga mengekspresikan tuntutan sosial terhadap kesetaraan dan keadilan.

Kebijakan diskriminatif tersebut akhirnya mendorong lahirnya reformasi sosial pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz (‘Umar II), yang memerintah antara tahun 717-720 M. Berbeda dengan para pendahulunya, ‘Umar II dikenal sebagai khalifah yang saleh, adil, dan memiliki visi egaliter. Ia menghapuskan diskriminasi terhadap mawālī dengan menegakkan prinsip kesetaraan antara Arab dan non-Arab dalam hak dan kewajiban keislaman. Ia juga memperluas akses pendidikan Islam, memperkuat lembaga keulamaan, dan menertibkan kebijakan pajak agar lebih adil bagi seluruh rakyat. Reformasi sosial ini bukan hanya langkah moral, tetapi juga strategi politik untuk meredakan ketegangan sosial dan memperkuat legitimasi dinasti. Meskipun masa pemerintahannya singkat, kebijakan-kebijakan ‘Umar II memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan struktur sosial Islam selanjutnya.⁸

Perubahan sosial di masa Umayyah juga tidak dapat dilepaskan dari proses urbanisasi yang pesat. Kota-kota besar seperti Damaskus, Kufa, Basra, dan Kairouan tumbuh menjadi pusat

⁷ Crone, Patricia, dan Martin Hinds. *God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

⁸ Du, Jone. “Political Transformation under Muawiyah ibn Abi Sufyan.” *Journal of Education and Humanities* 7, no. 2 (2023): 110–120. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3147>.

perdagangan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Urbanisasi ini melahirkan masyarakat kosmopolitan yang terdiri atas berbagai kelompok etnis, agama, dan profesi. Di kota-kota tersebut, muncul kalangan pedagang kaya, ulama, cendekiawan, dan birokrat yang memiliki peran penting dalam membentuk budaya dan pemikiran Islam klasik. Interaksi antara Arab, Persia, Romawi Timur, dan berbagai bangsa lainnya melahirkan asimilasi budaya yang memperkaya khazanah peradaban Islam mulai dari sistem hukum, sastra, hingga arsitektur. Dengan demikian, urbanisasi menjadi salah satu kekuatan utama yang mempercepat pembentukan identitas Islam sebagai peradaban global.

Namun di balik kemajuan tersebut, kesenjangan ekonomi semakin nyata. Sistem *diwān al-kharāj* yang mengatur pajak pertanian dan *diwān al-jund* yang mengatur administrasi militer menunjukkan kompleksitas ekonomi yang dikelola dengan baik, tetapi juga membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang oleh kalangan elit. Para pejabat birokrasi dan bangsawan Arab menikmati kehidupan mewah di kota-kota besar, sementara rakyat kecil dan *mawālī* sering kali menanggung beban pajak dan ketidakadilan ekonomi. Kesenjangan ini menjadi sumber ketegangan sosial yang terus meningkat menjelang akhir kekuasaan Umayyah.

Akhirnya, ketimpangan sosial-ekonomi dan diskriminasi etnis yang berlangsung selama masa Umayyah turut mempercepat kemunculan gerakan oposisi politik yang berujung pada berdirinya Dinasti Abbasiyah. Gerakan ini banyak didukung oleh kelompok *mawālī*, terutama dari Persia dan Khurasan, yang merasa termarginalkan dalam sistem Umayyah. Dengan mengusung ide kesetaraan dan keadilan sosial dalam Islam, gerakan Abbasiyah berhasil menggulingkan Umayyah pada tahun 750 M. Dari sini terlihat bahwa dinamika sosial baik berupa stratifikasi, urbanisasi, maupun ketimpangan ekonomi bukan sekadar latar belakang sejarah, melainkan faktor aktif yang membentuk arah perubahan politik dan peradaban Islam pada masa berikutnya.

3. Hubungan Politik dan Sosial: Dialektika Kekuasaan dan Masyarakat

Hubungan antara kekuasaan dan masyarakat pada masa Dinasti Umayyah tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga dialektis saling memengaruhi dan menyesuaikan sesuai dinamika sosial dan politik yang berkembang. Kekuasaan Umayyah, yang berpusat di Damaskus, berupaya membangun legitimasi melalui struktur pemerintahan yang terorganisir dan ideologi politik yang berakar pada identitas Arab-Islam. Namun, legitimasi ini tidak bersifat statis. Ia harus terus dinegosiasikan dengan realitas sosial yang kompleks, termasuk perbedaan etnis, kelas, dan religius. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak sekadar menindas atau mengatur masyarakat, tetapi juga membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial yang menopangnya.

Konsep *‘aṣabiyyah* dari Ibn Khaldun memberikan kerangka teoritis untuk memahami mekanisme hubungan ini. Pada awal berdirinya, Dinasti Umayyah bertumpu pada *‘aṣabiyyah* qabaliyah solidaritas kesukuan Arab, khususnya dari suku Quraisy dan cabang Bani Umayyah. Solidaritas ini berfungsi sebagai kekuatan pengikat yang memungkinkan ekspansi politik dan militer secara cepat setelah masa *Khulafā’ al-Rāsyidīn*. Namun seiring waktu, kemewahan istana, birokratisasi pemerintahan, dan ketimpangan sosial antar etnis (antara Arab dan *mawālī*, yakni non-Arab Muslim) mulai melemahkan daya kohesif *‘aṣabiyyah* tersebut. Proses ini sesuai dengan analisis Ibn Khaldun bahwa kekuasaan yang kehilangan solidaritas sosialnya akan menuju fase kemunduran.⁹

Kelemahan solidaritas internal membuka ruang bagi munculnya kekuatan sosial baru. Di antara kekuatan ini adalah kelompok *mawālī* terutama dari wilayah Khurasan dan Irak yang merasa termarginalkan oleh kebijakan diskriminatif Umayyah. Mereka kemudian menjadi basis dukungan penting bagi gerakan Abbasiyah yang menentang dominasi Arab. Selain itu, dinamika ini juga menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali berakar pada ketimpangan struktural

⁹ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, 3rd ed. (London: Routledge, 2016), 109–111.

dan eksklusif politik. Ketika struktur kekuasaan tidak mampu lagi merespons aspirasi masyarakat, oposisi menjadi bentuk ekspresi sosial yang sah dan kuat. Inilah tahap di mana 'asabiyyah baru berbasis ideologi keagamaan dan kesetaraan Islam menggantikan solidaritas lama yang berbasis kesukuan.

Dalam situasi sosial-politik yang menegangkan tersebut, peran ulama dan intelektual Muslim menjadi signifikan. Mereka berfungsi sebagai mediator moral antara negara dan masyarakat. Melalui fatwa, khutbah, dan karya intelektual, para ulama mengembangkan tradisi keilmuan Islam yang relatif otonom dari kepentingan politik. Ilmu-ilmu seperti fiqh, tafsir, dan hadis mulai berkembang dalam konteks perdebatan antara otoritas politik dan otoritas moral. Para ulama tidak hanya menjadi penafsir hukum agama, tetapi juga pembentuk opini publik yang berperan dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam pengertian ini, ilmu pengetahuan menjadi instrumen kontrol moral terhadap kekuasaan yang berpotensi absolut.¹⁰

Dengan demikian, dinamika politik-sosial pada masa Umayyah merupakan refleksi dari proses dialektik antara kekuasaan dan masyarakat. Kekuasaan mencoba mempertahankan stabilitas melalui kontrol politik dan ideologis, sementara masyarakat melalui gerakan sosial, intelektual, dan keagamaan merespons dengan cara adaptif atau resistif. Proses saling menyesuaikan ini menciptakan pola siklus sebagaimana dijelaskan Ibn Khaldun: dari pembentukan, kejayaan, hingga kemunduran suatu dinasti. Dari perspektif sejarah Islam, pelajaran penting dari pengalaman Umayyah adalah bahwa legitimasi politik tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan militer atau simbol keagamaan, melainkan harus ditopang oleh keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam sistem kekuasaan.¹¹

4. Analisis Konseptual: Legitimasi dan Keadilan dalam Perspektif Islam Klasik

Dari sudut pandang etika politik Islam, masa pemerintahan Dinasti Umayyah mencerminkan ketegangan antara prinsip normatif dan realitas politik. Dua konsep kunci dalam teori politik Islam — *mashrū'īyyah* (legitimasi) dan *'adl* (keadilan) menjadi ukuran moral terhadap pemerintahan. Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa kekuasaan politik hanya sah apabila dijalankan untuk menegakkan agama (*iqāmat al-dīn*) dan menjaga kemaslahatan umat (*ḥifẓ al-ummah*).¹² Prinsip ini menggarisbawahi bahwa negara dalam Islam bukan semata entitas politik, tetapi juga lembaga moral yang bertanggung jawab atas kesejahteraan spiritual dan material rakyatnya.

Konsep keadilan (*'adl*) kemudian menjadi aspek moral yang menyeimbangkan kekuasaan tersebut. Dalam tradisi politik Islam, *'adl* tidak hanya berarti keadilan hukum, tetapi juga kesetaraan sosial, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Reformasi yang dilakukan oleh Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz ('Umar II) merupakan contoh konkret penerapan nilai-nilai ini di tengah sistem monarki. Ia berusaha menghapus diskriminasi terhadap *mawālī*, mengembalikan harta rampasan negara kepada rakyat, serta menegakkan kebijakan yang lebih sesuai dengan semangat egalitarian Islam. Pemerintahannya menjadi bukti bahwa nilai moral dapat diinternalisasi dalam struktur politik tanpa harus mengubah sistem secara radikal. Lebih jauh, periode Umayyah juga menandai pergeseran konseptual dari teokrasi ideal menuju realisme politik. Ketika kekuasaan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan cita-cita normatif Islam, muncul kebutuhan untuk menegosiasikan ulang hubungan antara agama dan negara. Para ulama dan pemikir Muslim kemudian berperan penting dalam merumuskan teori-teori legitimasi yang lebih fleksibel, seperti konsep *tā'ah* (ketaatan kepada penguasa) selama tidak melanggar hukum Allah. Dengan cara ini, etika politik Islam beradaptasi terhadap kenyataan sejarah tanpa kehilangan orientasi moralnya.

¹⁰ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1980), 52–53.

¹¹ A. Wahid, "Konsep Asabiyyah Ibn Khaldun dalam Perspektif Sosiologi Kekuasaan," *Jurnal Sosiologi Agama* 8, no. 2 (2022): 133–135, <https://doi.org/10.14421/jsa.2022.82-09>.

¹² Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, ed. Ahmad Mubarak al-Baghdadi (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 25–27.

Namun, dalam konteks Dinasti Umayyah, *mashrūʿiyyah* kekuasaan lebih banyak bertumpu pada nasab Quraisy dan stabilitas pemerintahan daripada mekanisme *syūrā* (musyawarah) yang ideal. Klaim legitimasi berbasis keturunan ini memberikan dasar historis dan simbolis bagi kekuasaan Umayyah, tetapi sekaligus membuka ruang kritik teologis dari berbagai kelompok, seperti kaum *Khawārij* dan *Syiah*, yang menilai kekuasaan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam awal. Meski demikian, secara praktis, orientasi pada stabilitas politik memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang kuat, birokrasi yang efisien, dan ekspansi wilayah yang luas faktor yang secara *de facto* memperkuat *mashrūʿiyyah* dalam tataran sosial.

Akhirnya, pengalaman politik Dinasti Umayyah memperlihatkan bahwa legitimasi dan keadilan merupakan dua poros utama keberlangsungan kekuasaan dalam Islam. Ketika legitimasi hanya dijaga melalui simbol genealogis dan kekuatan militer tanpa keadilan sosial, kekuasaan menjadi rapuh di mata rakyat.¹³ Sebaliknya, ketika prinsip keadilan ditegakkan sebagaimana dicontohkan oleh ʿUmar II legitimasi politik memperoleh dasar moral yang kokoh. Dialektika antara idealisme Islam dan realitas kekuasaan inilah yang kemudian melahirkan tradisi politik Islam yang dinamis, di mana nilai-nilai normatif selalu berusaha menuntun praktik politik menuju keseimbangan antara kekuasaan, moralitas, dan kemaslahatan umat.

5. Simpulan

Kesimpulan tersebut mempertegas bahwa masa Dinasti Umayyah merupakan fase penting dalam evolusi politik dan sosial dunia Islam, di mana nilai-nilai normatif Islam berhadapan langsung dengan realitas kekuasaan dan tuntutan administrasi pemerintahan yang kompleks. Jika pada masa *Khulafāʾ Rāshidīn* legitimasi kekuasaan masih sangat terkait dengan spiritualitas dan keutamaan moral, maka pada era Umayyah terjadi institusionalisasi kekuasaan yang menuntut efisiensi, stabilitas, dan ekspansi. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana konsep *mashrūʿiyyah* (legitimasi) bergeser dari dasar religius-idealis menuju bentuk yang lebih pragmatis dan politis. Namun, pergeseran ini tidak berarti penolakan terhadap nilai-nilai Islam, melainkan penyesuaian antara prinsip-prinsip moral dengan kebutuhan politik yang semakin kompleks.

Lebih jauh, proses sosial yang berlangsung pada masa Umayyah menunjukkan dinamika yang saling memengaruhi antara struktur kekuasaan dan lapisan masyarakat. Ketimpangan antara bangsa Arab dan *mawālī* menimbulkan kesadaran baru akan pentingnya keadilan sosial (*ʿadl*) sebagai prinsip etika politik Islam. Dari sinilah muncul berbagai gerakan sosial dan intelektual yang menuntut persamaan di hadapan hukum Islam. Urbanisasi dan pertumbuhan pusat-pusat ilmu di kota-kota seperti Damaskus, Kufah, dan Basrah memperkuat lahirnya masyarakat kosmopolitan dengan identitas keislaman yang semakin beragam. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk arah politik dan peradaban.

Akhirnya, studi terhadap Dinasti Umayyah memberikan pelajaran bahwa sejarah politik Islam adalah sejarah negosiasi terus-menerus antara idealisme agama dan realitas sosial. Kekuatan Umayyah bukan hanya pada ekspansi militernya, tetapi pada kemampuannya menciptakan fondasi administratif dan kebudayaan yang kelak menjadi dasar kemajuan pada masa Abbasiyah. Dengan demikian, memahami dinamika politik dan sosial pada periode Umayyah bukan sekadar menelaah masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana Islam membangun peradaban yang adaptif di mana kekuasaan, moralitas, dan masyarakat saling berinteraksi dalam membentuk wajah peradaban Islam klasik.

Daftar Referensi

¹³ Patricia Crone dan Martin Hinds, *God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 42–44.

References

- Al-Māwardī. (1983). *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī. (1960). *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* (Vol. IV). Kairo: Dār al-Ma‘ārif.
- Chapra, M. U. (1999). Socioeconomic and Political Dynamics in Ibn Khaldun’s Thought. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 16(4), 17-38.
- Crone, P., & Hinds, M. (1986). *God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fatmawati, F. (2023). Social Dynamics and Intellectual Traditions During the Umayyad Dynasty. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 5(2), 337-356.
- Hugh Kennedy. (2004). *The Prophet and the Age of the Caliphates*. London: Routledge.
- Ibn Khaldun. (2005). *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Lapidus, I. M. (2014). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1980), 47-50.
- Patricia Crone dan Martin Hinds, *God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 42-44.
- Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2023). The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State. *Journal of Islamic Law*, 2(2).
- Walid, A. (2019). *Political Legitimacy and Authority in Early Islamic History*. New York: Routledge.